

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik termasuk kondisi perekonomian. Dalam pembukaan UUD 1945, tercantum tujuan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup seluruh individu tanpa terkecuali. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia umumnya lebih menitikberatkan pada pertumbuhan nilai ekonomi suatu daerah, yang merupakan hal yang umum bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya mengejar kesetaraan ekonomi dengan negara maju. Namun, menurut Todaro & S.C (2006) pembangunan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan suatu daerah. Berdasarkan teori pembangunan berbasis kesejahteraan atau teori kapabilitas, Amartya Sen pun berargumen bahwa pembangunan tidak hanya dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan saja, melainkan dengan kemampuan individu untuk mengakses pilihan hidup yang lebih baik (Ahmad & Wasito, 2023).

Menurut Suparmoko (1979) dalam (Alitasari *et al.*, 2014) Keberhasilan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu unsur penting yang diperoleh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah manusia sebagai objek untuk meningkatkan pembangunan ekonomi

suatu negara. Artinya, manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian selain sumber daya alam dan modal. Tanpa sumber daya manusia maka sumber daya alam yang berlimpah tidak dapat dikelola dengan baik. Namun, peningkatan perekonomian suatu daerah tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, melainkan lebih menekankan pada produktivitas. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu daerah atau negara.

United Nations Development Programmes (UNDP) menyatakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia bisa dilihat berdasarkan nilai indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut yaitu; indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Becker (1961) dalam Teori "*Human Capital*" menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah dengan nilai IPM yang tinggi umumnya memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, karena mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan lebih baik, yang berkontribusi pada produktivitas. Sebaliknya, nilai IPM yang rendah dapat menghambat pembangunan karena terbatasnya kualitas sumber daya manusia, yang berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat serta terbatasnya investasi dan inovasi di daerah tersebut.

Sedangkan menurut BPS (2020), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat) serta dapat menentukan level pembangunan suatu daerah/negara. Setiap daerah di Indonesia diharapkan terus meningkatkan nilai IPM untuk dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Tabel berikut menunjukkan peringkat dan nilai IPM Provinsi-provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1.1

Peringkat dan Nilai IPM Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019 dan 2023 (poin)

Peringkat	Provinsi	IPM	
		2019	2023
1	DKI Jakarta	80,76	82,46
2	DI Yogyakarta	79,99	81,07
8	Banten	72,44	73,87
10	Jawa Barat	72,03	73,74
13	Jawa Tengah	71,73	73,39
14	Jawa Timur	71,50	73,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan peringkat dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2019 dan 2023. Jika dilihat dari nilai IPM tahun 2019 dan 2023, nilai IPM pada setiap provinsi mengalami peningkatan. Provinsi DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi di Pulau Jawa, yaitu 82,46 poin pada tahun 2023, diikuti oleh DI Yogyakarta dengan nilai IPM 81,07 poin. Kedua provinsi ini masuk kedalam kategori tinggi dan menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dan maju dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Sementara itu, Jawa Barat menempati peringkat ke-10 secara nasional dan ke-4 di Pulau Jawa, dengan nilai IPM 73,74 poin pada tahun 2023. Meskipun

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, posisi Jawa Barat masih dibawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten. Hal ini menunjukkan Provinsi Jawa Barat masih memiliki tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan indikator IPM.

IPM provinsi merupakan hasil agregat dari kabupaten/kota didalamnya, maka pemerataan pembangunan di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam peningkatan IPM Jawa Barat secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, kinerja IPM di Jawa Barat sangat bergantung pada perkembangan IPM daerah-daerah didalamnya, termasuk Priangan Timur. Priangan Timur masih memiliki tantangan dalam pemerataan pembangunan manusia yang cukup terlihat. Meskipun Kota Tasikmalaya menunjukkan nilai IPM yang tinggi, namun Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya masih berada di peringkat terbawah di Jawa Barat. Berikut merupakan tabel peringkat dan nilai IPM kabupaten/kota di Priangan Timur:

Tabel 1.2

Peringkat dan Nilai IPM di Priangan Timur Tahun 2019 dan 2023 (poin)

Peringkat	Provinsi	IPM	
		2019	2023
9	Kota Tasikmalaya	72,84	74,47
12	Kota Banjar	71,75	73,08
15	Kab. Ciamis	70,39	72,05
21	Kab. Pangandaran	68,21	69,38
25	Kab. Garut	66,22	68,11
26	Kab. Tasikmalaya	65,64	67,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari enam kabupaten/kota yang ada di Priangan Timur, yaitu Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 dan 2023. Setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya kenaikan nilai IPM, meskipun data tersebut menunjukkan peningkatan, namun apabila dilihat dalam perbandingan peringkat antara 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, terdapat perbedaan yang cukup terlihat dalam nilai IPM antara kabupaten/kota di Priangan Timur.

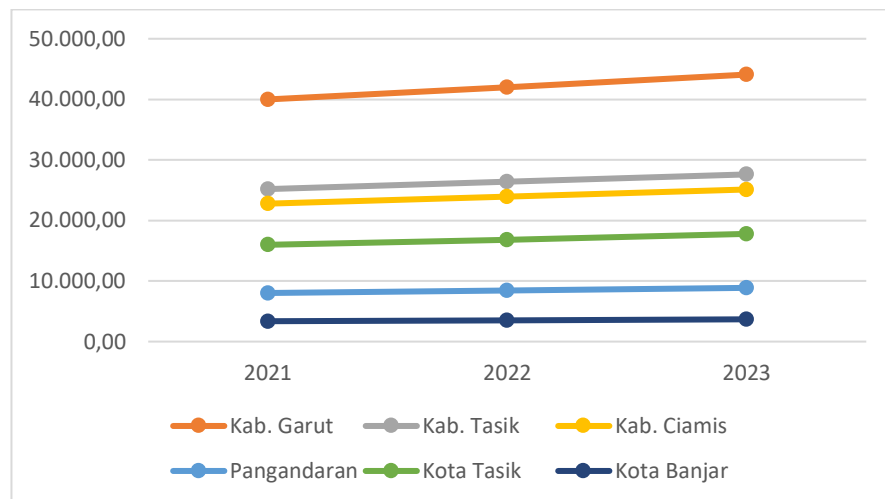
Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat ke-26 dengan nilai IPM sebesar 67,76 poin dan Kabupaten Garut menempati peringkat ke-25 dengan nilai IPM sebesar 68,11 poin yang merupakan masuk kedalam kategori sedang dan peringkat terendah kedua dan ketiga di Jawa Barat. Sementara itu, Kota Tasikmalaya berada di peringkat ke-10 besar, tepatnya peringkat ke-9 dengan nilai IPM sebesar 74,47 poin dan masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan manusia di Priangan Timur masih belum merata di masing-masing kabupaten/kota di Priangan Timur. Kota-kota cenderung memiliki nilai IPM lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan dalam program pengembangan pembangunan manusia yang diterapkan masing-masing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif agar peningkatan IPM dapat terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota Priangan Timur.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan meningkatkan layanan kesehatan, kualitas pendidikan,

kesempatan lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang terfokus di daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek pembangunan manusia tidak akan dapat bertahan lama (*sustainable*), karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional (Sahlan *et al.*, 2022).

Dalam upaya meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di enam kabupaten/kota di Priangan Timur, selanjutnya hal ini dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, yaitu kondisi perekonomian. Menurut Bappeda (2011) Perekonomian suatu daerah dapat diukur melalui proses produksi barang dan jasa yang berlangsung di wilayah tersebut. Proses produksi barang dan jasa itu dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB diharapkan dapat memperkuat indikator ekonomi dalam IPM, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Richardson (1991) dalam (Wahyuni *et al.*, 2024), menyatakan teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang mengacu pada peningkatan pendapatan masyarakat di suatu daerah, yang diukur dari kenaikan nilai tambah secara keseluruhan dalam harga konstan (riil). Peningkatan ini juga mencerminkan imbalan bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. Grafik berikut menunjukkan perkembangan nilai PDRB di Priangan Timur dalam tiga terakhir:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 1. 1

**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Priangan Timur
Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)**

Berdasarkan tabel 1.3 nilai PDRB di seluruh kabupaten/kota Priangan Timur mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Garut mencatat nilai PDRB tertinggi. Namun, tingginya nilai PDRB tidak selalu sejalan dengan peningkatan IPM. Meskipun Kabupaten Garut memiliki PDRB tertinggi dengan nilai 44.087,22 miliar pada tahun 2023, nilai IPM Kabupaten Garut masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu penyebab bisa terjadi, karena pendapatan yang belum merata atau keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas manusia. Dalam teori “*Human Capital*” Becker (1961) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan investasi dalam sumber daya manusia (SDM), termasuk pendidikan, pelatihan dan

kesehatan. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM.

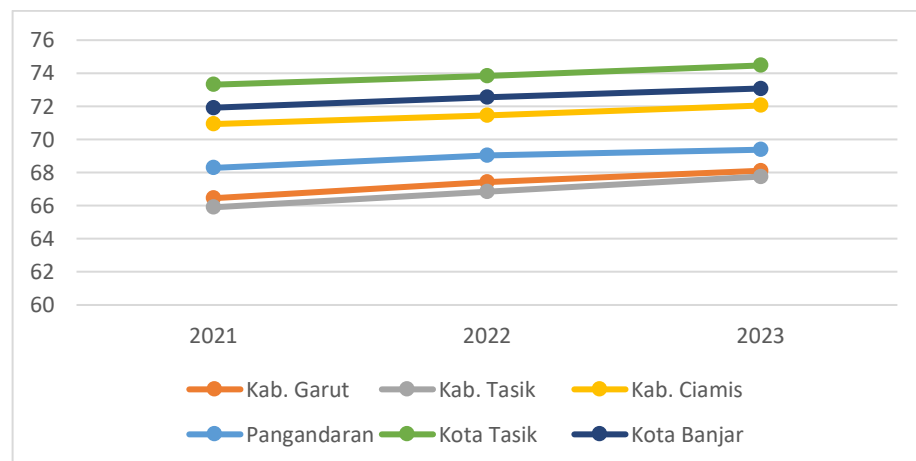
Pelaksanaan pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan, dan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Simarmata & Iskandar, 2022). Dalam mencapai, menjaga, serta meningkatkan tingkat pembangunan manusia, peran dari infrastruktur adalah penting. Infrastruktur membantu keseluruhan produktivitas manusia serta pembangunan suatu negara dan juga kualitas hidup dari masyarakatnya (Fadilla & Ratnawati, 2024).

Masing-masing dari ketersediaan infrastruktur tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perkembangan kualitas pembangunan manusia. Infrastruktur yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dasar yaitu sekolah dikenal menjadi pendorong utama yang meningkatkan modal manusia. Jumlah sekolah secara tidak langsung dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pada jangka panjang, jumlah sekolah akan meningkatkan IPM (Nugroho, 2016).

Lucas (1988) dalam (Mifrahi & Hanif 2023) mengemukakan teori “*Endogenous Growth*” bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur pendidikan yang memadai mendukung akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, yang akan

mempengaruhi IPM melalui peningkatan komponen-komponen seperti harapan lama sekolah dan harapan hidup.

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang merata di setiap lapisan masyarakat dapat diukur dengan rasio ketersediaan infrastruktur pendidikan. Melalui rasio ini, dapat diketahui sejauh mana kemampuan jumlah fasilitas pendidikan yaitu sekolah untuk dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah ini dapat dihitung per 10.000 penduduk usia sekolah (Disdik, 2018). Berikut merupakan grafik dari rasio ketersediaan infrastruktur pendidikan kabupaten/kota di Priangan timur tahun 2021-2023.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 (diolah)

Gambar 1.2

**Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan di Priangan Timur
Tahun 2021-2023 (unit)**

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah, kebutuhan terhadap akses pendidikan yang berkualitas menjadi semakin penting. Gambar 1.2 menunjukkan rasio ketersediaan infrastruktur pendidikan. Rasio ini dihitung berdasarkan jumlah total sekolah (SD, SMP, dan SMA) dibagi jumlah penduduk usia sekolah, kemudian dikalikan 10.000. Rasio ini menggambarkan berapa banyak

satuan pendidikan yang tersedia untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah di suatu wilayah.

Kabupataen Garut menunjukkan nilai rasio sebesar 37,02 pada tahun 2021, menurun menjadi 35,72 pada tahun 2022, lalu Kembali meningkat menjadi 37,01 pada tahun 2023. Artinya, pada tahun 2023 terdapat sekitar 37 sekolah yang tersedia untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah di Kabupaten Garut. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, secara umum Kabupaten Garut memiliki ketersediaan infrastruktur pendidikan yang relatif tinggi di bandingkan wilayah lain di Priangan Timur. Sementara itu, Kota Banjar mencatat rasio yang lebih rendah dan cenderung stabil, yaitu 30,04 pada tahun 2021, meningkat menjadi 30,21 pada tahun 2022 dan 30,30 pada tahun 2023. Artinya, pada tahun 2023 tersedia sekitar 30 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah di Kota Banjar.

Perbedaan nilai rasio ini, menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki tingkat ketersediaan sekolah yang lebih baik dibandingkan Kota Banjar. Rasio yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan aksibilitas pendidikan dan mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah dapat menjadi indikator perlunya peningkatan jumlah satuan pendidikan/sekolah untuk mendorong pemerataan akses pendidikan.

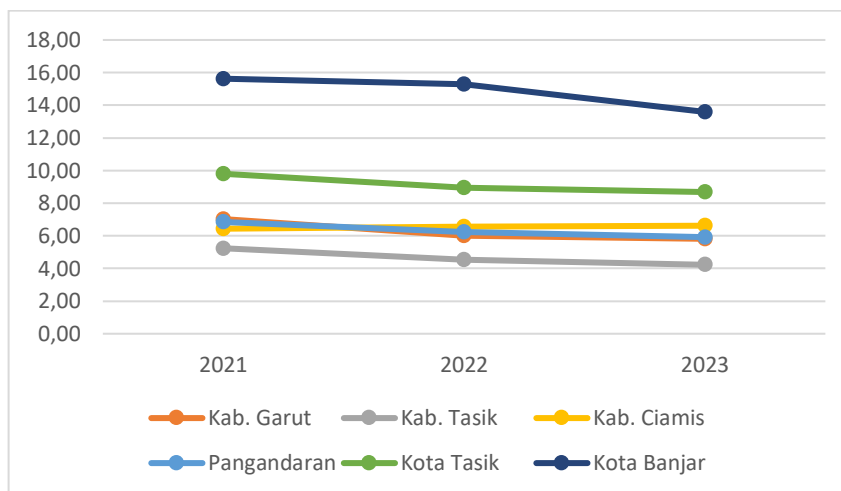
Kualitas pendidikan di setiap kabupaten/kota dapat diukur dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Kehadiran sekolah dan akses terhadap sekolah bisa meningkatkan jumlah partisipasi sekolah dan dengan menyediakan sekolah dengan lokasi jarak yang

dekat dengan pemukiman dapat meningkatkan partisipasi sekolah yang merupakan indikator IPM (Antoni, 2024).

Selain pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah sektor kesehatan, kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari sisi kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (BPS, 2019). Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena kesehatan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Grossman (1972) dalam (Galama & Kippersluis, 2013) mengemukakan teori “*Health Capital*” bahwa kesehatan adalah modal manusia yang penting bagi produktivitas dan kualitas hidup. Infrastruktur kesehatan yang baik, seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas medis lainnya, mendukung kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan harapan hidup. Hal ini berpengaruh langsung terhadap IPM, karena harapan hidup adalah salah satu komponen dari kesehatan yang penting dalam pengukuran IPM.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata di setiap lapisan masyarakat dapat diukur dengan rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dengan jumlah fasilitas kesehatan sebaiknya seimbang dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota, sehingga pelayanan kesehatan dapat terdistribusi dengan baik. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan tersebut adalah rasio puskesmas dan rumah sakit per 100.000 penduduk (Kemkes, 2019).

Berikut merupakan grafik dari jumlah unit fasilitas kesehatan dan jumlah penduduk yang dimiliki kabupaten/kota di Priangan timur dalam tiga tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023(diolah)

Gambar 1.3
Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan di Priangan Timur
Tahun 2021-2023 (unit)

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit) yang memadai menjadi semakin penting. Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan rasio ketersediaan infrastruktur kesehatan. Rasio ini dihitung berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas) per 100.000 penduduk di setiap daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kapasitas daerah dalam menyediakan layanan kesehatan dasar secara merata bagi masyarakat.

Kabupaten Garut mencatat rasio sebesar 7,02 pada tahun 2021, menurun menjadi 6,02 pada tahun 2022, dan sedikit menurun di angka 5,82 pada tahun 2023. Artinya, pada tahun 2023 hanya tersedia sekitar 6 unit fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit dan puskesmas untuk setiap 100.000 penduduk. Nilai ini

menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur kesehatan di Garut relatif rendah dan mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas kesehatan secara signifikan. Sebaliknya, Kota Banjar mencatat rasio yang lebih tinggi dari Kabupaten Garut, yaitu 15,63 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 15,28 di tahun 2022, dan kembali turun menjadi 13,59 pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, nilai rasio ini tetap menunjukkan bahwa Kota Banjar memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Garut.

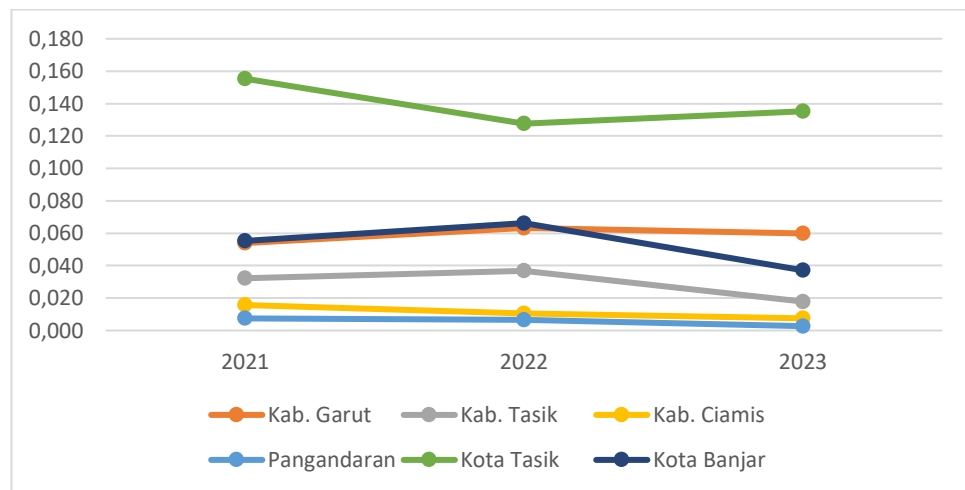
Perbedaan nilai rasio antar daerah ini, menunjukkan terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan dalam penyediaan layanan kesehatan. Kabupaten dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar seperti Kabupaten Garut memiliki tantangan lebih besar dalam menjangkau seluruh masyarakat dengan layanan kesehatan yang memadai. Dalam upaya mencapai pemerataan pembangunan kesehatan, diharapkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan akan ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Pembangunan infrastruktur kesehatan, baik secara kualitas maupun kuantitas juga akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (Mujibaturrahmah & Silvia, 2023)

Menurut Nurfauziah (2021), tingginya jumlah fasilitas kesehatan yang ada di setiap kabupaten/kota belum menjamin apakah fasilitas tersebut sudah dikatakan cukup layak untuk menunjang kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu memberikan perhatian lebih agar fasilitas kesehatan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga. Peningkatan jumlah puskesmas dan rumah sakit tidak selalu mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu daerah.

Infrastruktur lainnya yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pembangunan infrastruktur jalan. Menurut PUPR (2018), Jalan raya memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktivitas sosio-ekonomi suatu daerah, pembangunan infrastruktur jalan merupakan nadi bagi mobilitas masyarakat. Tidak hanya mobilitas tetapi jalan dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama di wilayah seperti Priangan Timur yang memiliki karakteristik geografis beragam dan populasi yang terus bertambah.

Menurut PUPR (2017) dalam (Hadi *et al.*, 2021), untuk menggunakan indikator tingkat pelayanan jalan berdasarkan rasio panjang jalan dan luas wilayah. Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah terkait (km^2). Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1km^2 luas wilayah yang menjadikan informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio semakin baik aksesibilitas wilayah tersebut, sehingga konektivitas jalan di daerah tersebut juga semakin baik. Berikut merupakan grafik dari jumlah panjang jalan dan juga luas wilayah yang dimiliki kabupaten/kota di Priangan timur tahun dalam tiga tahun terakhir:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023(diolah)

Gambar 1.4
Rasio Ketersediaan Infrastruktur Jalan di Priangan Timur
Tahun 2019-2023 (km)

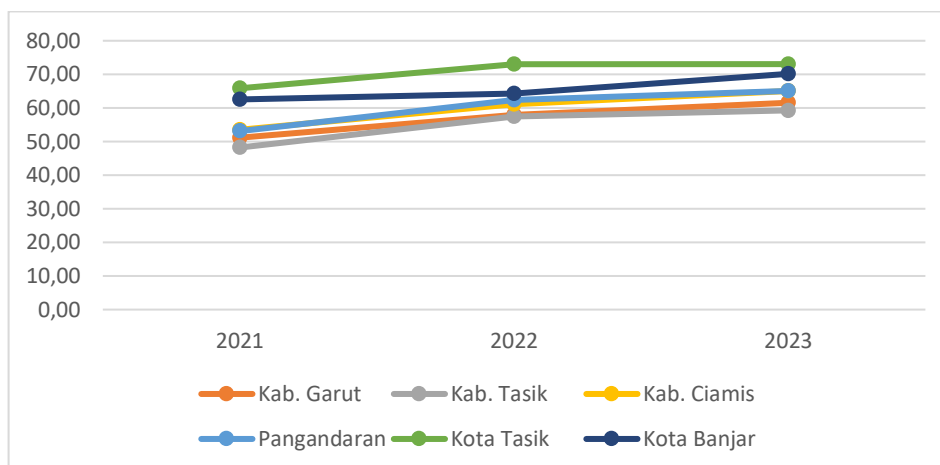
Infrastruktur jalan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pada gambar 1.4 menunjukkan rasio ketersediaan infrastruktur jalan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik (km) dengan luas wilayah (km^2) di masing-masing kabupaten/kota di Priangan Timur. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kepadatan jalan yang layak digunakan dalam suatu wilayah.

Kota Tasikmalaya secara konsisten mencatat nilai rasio tertinggi dengan nilai rasio 0,115 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0,128 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 0,135 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk setiap km^2 luas wilayah di Kota Tasikmalaya relatif tinggi, yang berpotensi memperlancar mobilitas masyarakat. Sebaliknya, Kabupaten Pangandaran mencatat rasio terendah, yaitu 0,07 pada tahun 2021 dan 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,03 pada tahun 2023.

Rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik masih terbatas dengan luas wilayahnya, yang dapat menghambat mobilitas masyarakat yang berpotensi memperlambat pembanguana manusia dan ekonomi daerah tersebut.

Fluktuasi yang terjadi di masing-masing daerah ini, dapat disebabkan oleh perubahan panjang jalan yang masuk kondisi baik setiap tahunnya, serta perubahan dalam luas wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualiatas infrastruktur jalan secara merata menjadi penting untuk memperkuat konektivitas antar daerah yang dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara merata.

Variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah akses internet. Di era digital saat ini, akses internet telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Internet tidak hanya mempermudah komunikasi dan akses informasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Menurut Castells (1996) dalam (Taner & Sevil, 2020) mengemukakan teori “*The Rise of the Network Society*” menjelaskan masyarakat yang memiliki akses internet yang luas lebih cepat mengalami transformasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan manusia, akses internet dapat mendorong peningkatan IPM dengan memperluas kesempatan pendidikan daring, layanan kesehatan digital, serta akses terhadap peluang kerja berbasis teknologi. Berikut merupakan grafik dari jumlah akses internet kabupaten/kota di Priangan timur dalam tiga tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, (Diolah)

Gambar 1.5

Akses Internet di Priangan Timur tahun 2021-2023 (persen)

Menurut gambar 1.5 menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki pengguna internet tertinggi, yaitu 73,05% pada tahun 2023, sementara Kabupaten Garut memiliki pengguna internet terendah, yaitu 61,55%. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan digital yang masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota Tasikmalaya, sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Priangan Timur, memiliki akses internet yang lebih luas, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas masyarakat serta peluang ekonomi berbasis digital. Sebaliknya, daerah dengan akses internet terbatas, seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran, berisiko tertinggal dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur digital menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan IPM di seluruh wilayah Priangan Timur secara lebih merata.

Kebaruan dari peneliti yaitu adanya pengaruh akses internet terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penggunaan rumus rasio pada perhitungan ketersediaan infrastruktur. Hal ini, merupakan topik yang jarang

dibahas banyak peneliti sebelumnya sehingga memberikan kontribusi baru mengenai hubungan antara teknologi, infrastruktur dan pembangunan manusia. Dengan menggunakan rumus rasio untuk mengukur ketersediaan infrastruktur, peneliti menawarkan model analisis yang lebih objektif dan terperinci, yang selama ini kurang diperhatikan oleh peneliti terdahulu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Priangan Timur.

Melihat beberapa indikator dan penjelasan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis sejauh mana Indeks Pembangunan Manusia di enam Kabupaten/Kota di Priangan Timur serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh PDRB, Ketersediaan Infrastruktur dan Akses Internet terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Priangan Timur tahun 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB, ketersediaan infrastruktur pendidikan, ketersediaan infrastruktur kesehatan, ketersediaan infrastruktur jalan, dan akses internet secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Priangan Timur tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, ketersediaan infrastruktur pendidikan, ketersediaan infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, dan akses internet

secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Priangan Timur tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh PDRB, ketersediaan infrastruktur pendidikan, ketersediaan infrastruktur kesehatan, ketersediaan infrastruktur jalan, dan akses internet secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Priangan Timur tahun 2019-2023.
2. Mengetahui pengaruh PDRB, ketersediaan infrastruktur pendidikan, ketersediaan infrastruktur kesehatan, ketersediaan infrastruktur jalan, dan akses internet secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Priangan Timur tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan menjadi rujukan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan dan akses internet terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai bahan informasi bagi peneliti lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah di Priangan Timur dalam merumuskan kebijakan yang lebih

1.5.1 Lokasi Penelitian

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.3[illegible]